



REZIM KELAPARAN: IRONI KRISIS NUTRISI LOKAL DI TENGAH SURPLUS PANGAN NASIONAL DI MERAUKE

¹Iberto Halawa ²Karolina Refasi

¹²Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur

Email: Ibertohalawa22@gmail.com

Received 1 January 2026; Revised: 3 January 2026; Accepted: 15 January 2026; Published: 20 January 2026 ; Available online: January 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks antara surplus pangan nasional dan krisis nutrisi lokal yang terjadi di Kabupaten Merauke. Fokus permasalahan penelitian diarahkan pada ketimpangan antara peningkatan produksi beras melalui proyek lumbung pangan nasional dengan kondisi akses pangan dan kualitas gizi masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat. Penelitian ini juga menelaah bagaimana kebijakan pangan berskala besar, sistem distribusi, serta alih fungsi lahan adat memengaruhi keberlanjutan sistem pangan lokal dan ketahanan gizi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, data statistik resmi, serta dokumen digital yang relevan dengan isu pangan dan nutrisi di Merauke. Analisis data diperdalam menggunakan perspektif ekologi politik untuk memahami relasi kuasa negara, korporasi, dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surplus produksi beras di Merauke tidak berbanding lurus dengan perbaikan status gizi masyarakat lokal. Ekspansi proyek pangan skala besar menyebabkan hilangnya sumber pangan tradisional, fragmentasi ruang hidup adat, serta pergeseran pola konsumsi menuju pangan pasar yang homogen dan rendah mikronutrien. Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya prevalensi *stunting* dan anemia, terutama pada kelompok rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis nutrisi di Merauke bukan disebabkan oleh kelangkaan pangan, melainkan oleh kegagalan sistemik dalam menjamin akses, keberagaman, dan kualitas pangan. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan perlu mengintegrasikan perlindungan hak ulayat, penguatan pangan lokal, dan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial budaya masyarakat adat.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Krisis Nutrisi, Masyarakat Adat, Ekologi Politik, Merauke

ABSTRACT

This study aims to analyze the paradox between national food surplus and local nutritional crisis occurring in Merauke Regency. The research focuses on the disparity between increased rice production through the national food estate program and the conditions of food access and nutritional quality among local communities, particularly Indigenous peoples. It also examines how large-scale food policies, distribution systems, and the conversion of customary land affect the sustainability of

local food systems and community nutritional resilience. This study employs a qualitative method using a descriptive-analytical case study approach. Data were collected through a literature review of scholarly journal articles, policy reports, official statistical data, and relevant digital documents related to food and nutrition issues in Merauke. The analysis is strengthened by a political ecology perspective to understand power relations among the state, corporations, and Indigenous communities in the governance of food resources. The findings indicate that rice production surplus in Merauke does not correspond with improvements in local nutritional status. The expansion of large-scale food projects has resulted in the loss of traditional food sources, fragmentation of Indigenous living spaces, and a shift in consumption patterns toward market-based foods that are homogeneous and low in micronutrients. These conditions contribute to the high prevalence of stunting and anemia, particularly among vulnerable groups. This study concludes that the nutritional crisis in Merauke is not caused by food scarcity but by systemic failures in ensuring food access, diversity, and quality. Therefore, food security policies need to integrate the protection of customary land rights, the strengthening of local food systems, and approaches that are sensitive to the socio-cultural contexts of Indigenous communities.

Keywords: Food Security; Nutritional Crisis; Indigenous Communities; Political Ecology; Merauke

PENDAHULUAN

Merauke sering diposisikan sebagai lumbung pangan nasional melalui proyek pangan skala besar yang menargetkan surplus produksi beras dan komoditas strategis lainnya. Namun, di balik narasi surplus tersebut, masih terdapat persoalan serius berupa krisis nutrisi yang dialami masyarakat lokal, khususnya komunitas adat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan pangan nasional dan akses pangan di tingkat lokal. Pembangunan pangan di Merauke lebih menekankan pada peningkatan produksi dibandingkan pemenuhan gizi masyarakat setempat.

Masyarakat lokal sering kali kehilangan sumber pangan tradisional akibat alih fungsi lahan untuk pertanian industri. Hilangnya hutan, sagu, dan sumber protein lokal berdampak langsung pada kualitas konsumsi rumah tangga. Data Badan

Pusat Statistik menunjukkan bahwa Merauke masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi 23% dibandingkan rata-rata nasional (Kemenkes RI, 2023). Fakta ini memperkuat argumen bahwa surplus pangan tidak otomatis menurunkan masalah gizi. Ketergantungan pada beras sebagai pangan utama juga menggeser pola makan lokal yang sebelumnya lebih beragam.

Sistem pangan di Merauke menunjukkan kecenderungan tidak sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat adat Papua, sehingga berpotensi memperbesar kerentanan gizi lokal. FAO menegaskan bahwa sistem pangan yang mengabaikan kondisi lokal dapat menghasilkan ketimpangan nutrisi meskipun produksi pangan meningkat (FAQ, 2017).

Dalam konteks Merauke, kebijakan pangan lebih diarahkan pada pencapaian surplus nasional

dibandingkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat setempat³. Distribusi hasil pangan dari wilayah produksi sebagian besar ditujukan untuk pasar nasional dan rantai pasok industri⁴. Akibatnya, masyarakat di sekitar kawasan produksi tidak memperoleh manfaat langsung dari aktivitas pertanian skala besar tersebut.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat beralih dari produsen pangan mandiri menjadi konsumen yang bergantung pada pasar. Perubahan tersebut turut melemahkan ketahanan pangan rumah tangga berbasis sumber daya lokal. Sejumlah studi mencatat bahwa ekspansi proyek pangan di Papua berdampak pada hilangnya sumber pangan tradisional seperti sagu, umbi-umbian, dan protein hutan. Hilangnya pangan tradisional ini berimplikasi pada penurunan keberagaman konsumsi masyarakat adat. Jurnal kajian pembangunan menunjukkan bahwa proyek pangan skala besar sering mengabaikan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif-analitis untuk membedah fenomena krisis nutrisi di tengah surplus pangan. Menurut Robert K. Yin, studi kasus merupakan metode yang sangat tepat untuk menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena kontemporer terjadi dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (library

dimensi sosial dan budaya pangan masyarakat lokal (Benegiamo, 2022). Pola pembangunan yang bersifat top-down membuat suara masyarakat adat kurang terakomodasi dalam perencanaan pangan. Ketidakterlibatan tersebut menyebabkan kebijakan pangan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Merauke.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan antara surplus pangan nasional dan kondisi krisis nutrisi yang dialami masyarakat lokal di Merauke, bagaimana kebijakan dan proyek pangan skala besar memengaruhi akses pangan dan kualitas gizi masyarakat adat. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi peran sistem distribusi pangan dalam menciptakan kerentanan konsumsi di wilayah produksi pangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menelaah dampak pengabaian konteks sosial dan budaya lokal terhadap ketahanan pangan masyarakat Merauke.

METODE

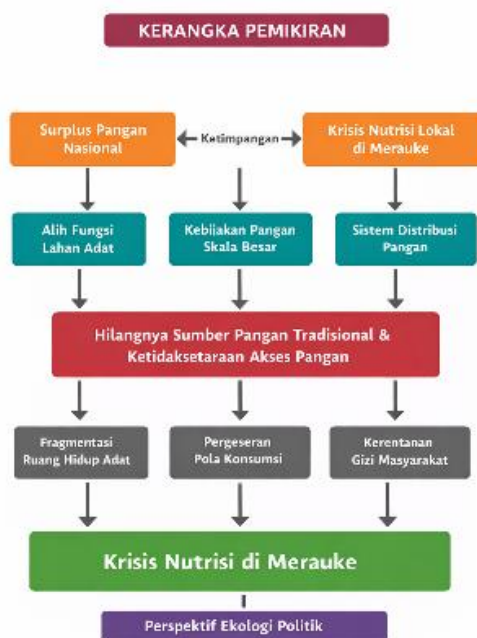
research) dengan menelaah berbagai literatur sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen digital dari internet yang relevan. Fokus tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana kebijakan surplus pangan nasional justru menciptakan kerentanan gizi pada masyarakat lokal di Merauke.

Analisis ini dipertajam dengan menggunakan teori Ekologi Politik menurut Nancy Lee Peluso. Teori

Peluso dipilih karena kemampuannya dalam menjelaskan konsep kontrol teritorial negara terhadap sumber daya alam (Peluso, 2016). Alasan utama penggunaan teori ini adalah karena krisis di

Merauke bukan disebabkan oleh kelangkaan pangan secara biologis, melainkan akibat perubahan status lahan dari hutan adat menjadi area proyek strategis.

Gambar 1. Alur Berpikir



Sumber : Olahan Peneliti, 2025

PEMBAHASAN

Analisis Ketimpangan Surplus Nasional vs Nutrisi Lokal

Kabupaten Merauke saat ini sedang dipacu untuk menjadi pilar utama lumbung pangan nasional melalui proyek cetak sawah satu juta hektar di wilayah Timur Indonesia. Pemerintah memproyeksikan Merauke mampu memberikan kontribusi besar terhadap cadangan beras nasional

demikian mencapai ambisi swasembada pangan yang berkelanjutan. Berdasarkan data dari artikel internet Merauke mencatat surplus beras mencapai sekitar 193.933 ton, jauh melebihi kebutuhan konsumsi lokalnya.

Gambar 2. Merauke Cetak Surplus Beras 193 Ribu Ton



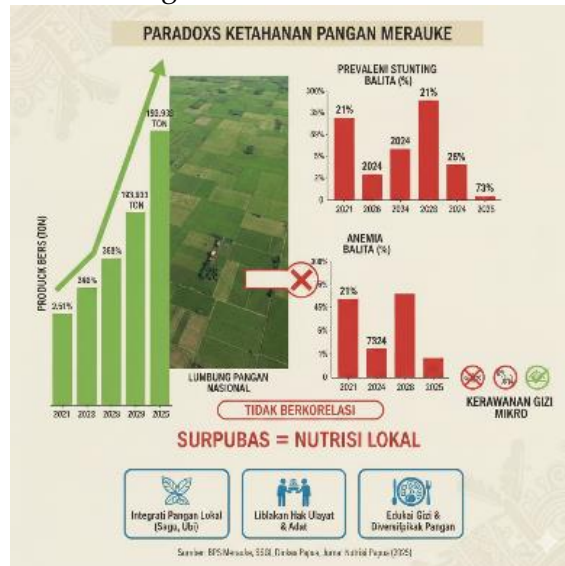
Sumber: (Budiono, 2025)

Dari gambar ini menunjukkan perubahan positif kapasitas produksi yang signifikan dan kontribusi terhadap swasembada pangan nasional. Meskipun capaian produktivitas beras di wilayah tersebut menunjukkan angka yang signifikan, terdapat diskrepansi fundamental dalam pemenuhan status gizi penduduk setempat, khususnya pada komunitas Orang Asli Papua (OAP). Implementasi kebijakan food estate berskala masif cenderung menciptakan kontradiksi terhadap sistem kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal yang telah mapan secara turun-temurun. Transformasi ekosistem hutan dan rawa menjadi lahan monokultur padi telah mengakibatkan degradasi aksesibilitas masyarakat terhadap sumber protein hewani liar, seperti populasi rusa dan biota air tawar. Sagu, sebagai pilar pangan fungsional sekaligus representasi identitas sosiokultural suku Marind, mengalami marginalisasi akibat ekspansi komoditas sereal. Fenomena ini memicu transisi nutrisi yang mengkhawatirkan, di mana pola diet masyarakat bergeser dari konsumsi

pangan beragam yang padat nutrisi menuju pola makan berbasis karbohidrat tunggal yang rendah asupan mikronutrien.

Survei gizi menunjukkan prevalensi kurang gizi pada balita (berat badan kurang, stunting, anemia) tetap signifikan di

Merauke. Tingkat pendek (stunting) pada balita tercatat sekitar 21%, sementara anemia pada kelompok yang disurvei mencapai 73,7%.

Gambar 3. Perbandingan Produksi Beras vs Prevalensi Stunting

Sumber: (Merauke, 2025)

Gambar ini menunjukkan bahwa paradoks ketahanan pangan di Merauke, di mana peningkatan produksi beras yang sangat tinggi sebagai lumbung pangan nasional tidak berbanding lurus dengan perbaikan kondisi nutrisi masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan secara kuantitatif belum mampu menjamin pemenuhan gizi secara kualitatif. Tingginya angka anemia balita yang bahkan mencapai lebih dari 70 persen pada periode tertentu memperkuat indikasi adanya kerawanan gizi mikro yang serius. Ketidakterkaitan Ruang Hidup yang Terfragmentasi: Kontradiksi Ekologi Antara Lumbung Padi dan Wilayah Adat Kebijakan lumbung pangan nasional atau food estate merupakan proyek strategis pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memperkuat ketahanan

antara surplus produksi dan status gizi lokal mencerminkan kegagalan dalam mendistribusikan manfaat pembangunan pangan kepada masyarakat setempat.

Kebijakan pangan yang berfokus pada satu komoditas utama, yaitu beras, cenderung mengesampingkan keberagaman pangan lokal yang sebenarnya kaya akan zat gizi. Selain itu, berkurangnya akses terhadap pangan tradisional seperti sagu, umbi-umbian, dan sumber protein lokal turut memperlebar ketimpangan nutrisi.

pangan di tengah ancaman krisis global. Program ini mengedepankan integrasi produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan di atas lahan berskala luas yang umumnya dikelola dengan teknologi modern. Fokus utama pengembangan proyek

ini terletak pada wilayah dengan potensi lahan luas seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua (Andaiyani et al., 2024).

Pemerintah berargumen bahwa mekanisasi pertanian melalui food estate akan meningkatkan efisiensi dan hasil panen secara signifikan. Namun, implementasinya sering kali memicu perdebatan sengit terkait efektivitasnya dalam menjawab kedaulatan pangan rakyat kecil. Situasi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat diukur hanya dari volume produksi semata. Aspek distribusi, akses, dan kualitas pangan memiliki peran yang sama pentingnya. Oleh karena itu, penguatan integrasi pangan lokal, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, serta peningkatan edukasi gizi menjadi langkah strategis untuk menjembatani ketimpangan antara surplus pangan nasional dan kondisi nutrisi lokal di Merauke (Wisnaeni & Najib, 2025).

Konversi lahan skala besar untuk program lumbung pangan nasional

sering kali beroperasi dengan logika industrial yang secara sistematis mengabaikan tata ruang tradisional masyarakat adat (Yuwono, 2024). Dalam kacamata ekologi politik, fenomena ini menunjukkan bagaimana kekuasaan negara dan korporasi mendominasi distribusi sumber daya alam dengan meminggirkan hak ulayat yang telah ada sebelum negara berdiri. Fragmentasi ekologi terjadi ketika bentang alam hutan yang utuh diubah menjadi petak-petak monokultur, menghancurkan koridor hayati yang krusial bagi keseimbangan alam (Adiwilaga, R., & Firman, 2020). Secara bersamaan, fragmentasi sosial muncul akibat penetrasi infrastruktur pendukung seperti jalan logistik dan kanal besar yang memutus akses fisik masyarakat adat terhadap wilayah jelajah mereka. Infrastruktur ini bertindak sebagai hambatan artifisial yang merusak konektivitas antara komunitas adat dengan situs-situs keramat dan sumber pangan tradisional (Nugroho, 2021).

Gambar 4. *Food Estate Merauke*



Sumber: (Pusaka, 2024)

Gambar ini menunjukkan bahwa kebijakan *food estate* Ruang hidup masyarakat adat di Merauke mengalami fragmentasi yang semakin nyata seiring dengan pengembangan lumbung padi skala besar sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional. Alih fungsi hutan, rawa, dan lahan adat menjadi area persawahan telah mengubah lanskap ekologis yang selama ini menopang sistem hidup masyarakat lokal. Wilayah adat yang sebelumnya menjadi sumber pangan, air, dan identitas budaya terpecah oleh batas-batas administratif dan infrastruktur pertanian modern. Kontradiksi muncul ketika peningkatan produksi padi dipromosikan sebagai keberhasilan nasional, sementara masyarakat adat justru kehilangan akses terhadap ruang hidupnya sendiri. Model pertanian monokultur menggantikan sistem pangan lokal **Akumulasi melalui Perampasan dan Marginalisasi Nutrisi di Merauke**

Ekspansi proyek pangan skala besar di Merauke telah mendorong proses perampasan ruang hidup masyarakat adat secara sistematis. Lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai basis sistem pangan subsisten—seperti hutan sagu, sungai, rawa, dan wilayah berburu beralih fungsi menjadi area produksi monokultur berorientasi pasar. Transformasi ini tidak hanya menghilangkan kepemilikan dan kontrol masyarakat adat atas tanah, tetapi juga memutus relasi ekologis yang menopang keberlanjutan

yang beragam dan adaptif terhadap kondisi ekologis setempat. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga melemahkan relasi sosial, pengetahuan lokal, dan praktik adat yang terikat pada alam. Fragmentasi ruang hidup tersebut mempersempit kemampuan masyarakat adat untuk mempertahankan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal. Di sisi lain, proses perencanaan dan pelaksanaan proyek sering kali tidak melibatkan partisipasi bermakna dari komunitas adat. Akibatnya, pembangunan lumbung padi menciptakan ketimpangan antara kepentingan produksi nasional dan keberlanjutan ekologi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan yang mengabaikan keutuhan ruang hidup adat berpotensi melahirkan krisis ekologis dan sosial yang berkepanjangan.

pangan lokal. Dalam perspektif *accumulation by dispossession*, perampasan tersebut merupakan mekanisme utama dalam proses akumulasi kapital kontemporer (Harvey, 2003). Negara memainkan peran sentral sebagai fasilitator dengan menyediakan kerangka regulasi, legitimasi politik, serta infrastruktur pendukung bagi investasi agribisnis. Sementara itu, korporasi memperoleh akses terhadap lahan dalam skala luas, sering kali melalui mekanisme yang melemahkan hak ulayat dan otoritas adat. Proses ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana

masyarakat lokal kehilangan kontrol atas sumber daya yang sebelumnya menopang keberlanjutan hidup mereka.

Perampasan ruang hidup di Merauke tidak hanya berdimensi material, tetapi juga berdimensi ekologis dan kultural. Sistem pangan tradisional masyarakat adat bersifat adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat dan berbasis pada keberagaman sumber pangan, seperti sagu sebagai sumber karbohidrat utama, serta ikan, satwa liar, dan tanaman hutan sebagai sumber protein dan mikronutrien (Lahay, 2025). Perubahan struktur produksi pangan di Merauke beriringan dengan integrasi wilayah ini ke dalam rezim pangan nasional. Rezim pangan, sebagaimana dikemukakan oleh McMichael (2013), merupakan konfigurasi historis relasi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang didominasi oleh aktor negara dan korporasi. Dalam konteks Merauke, integrasi ini ditandai dengan dominasi beras sebagai indikator utama ketahanan pangan serta marginalisasi pangan lokal yang tidak sesuai dengan logika pasar nasional (McMichael, 2013).

Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi produksi pangan berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat adat. Ketika akses terhadap pangan lokal semakin terbatas, masyarakat terdorong untuk bergantung pada pangan pasar, khususnya beras dan pangan instan. Bantuan pangan dari negara, meskipun dimaksudkan sebagai

jaring pengaman, secara tidak langsung memperkuat homogenisasi konsumsi dan melemahkan sistem pangan lokal yang sebelumnya mandiri. Transformasi konsumsi ini mencerminkan pergeseran dari pola makan yang beragam dan kaya nutrisi menuju pola makan yang lebih sempit secara gizi. Beras, sebagai pangan dominan, memang menyediakan energi, tetapi miskin protein dan mikronutrien jika tidak diimbangi dengan sumber pangan lain. Ketergantungan pada pangan instan juga memperburuk kualitas nutrisi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Marginalisasi nutrisi terjadi ketika sistem pangan yang dominan tidak mampu menyediakan pangan yang bergizi, beragam, dan sesuai dengan kebutuhan biologis serta kultural masyarakat. Pergeseran dari pangan lokal berbasis ekologi menuju pangan pasar berbasis karbohidrat tunggal mengakibatkan penurunan asupan protein, vitamin, dan mineral esensial.

Dampak dari kondisi ini paling nyata dirasakan oleh anak-anak, yang mengalami gangguan pertumbuhan jangka panjang dalam bentuk stunting. Pendekatan entitlement yang dikemukakan oleh Sen (1981) membantu menjelaskan fenomena ini. Menurut Sen, kelaparan dan malnutrisi tidak selalu disebabkan oleh kurangnya pangan, melainkan oleh kegagalan akses terhadap pangan (Sen, 1981). Dalam konteks Merauke, masyarakat kehilangan entitlement atas pangan bergizi akibat

perubahan struktur kepemilikan lahan, distribusi, dan konsumsi. Dengan kata lain, krisis nutrisi merupakan hasil dari kegagalan sistemik dalam menjamin hak atas pangan. Marginalisasi nutrisi juga mencerminkan bentuk kekerasan struktural, di mana dampak kebijakan dan pembangunan tidak dirasakan secara langsung sebagai kekerasan fisik, tetapi termanifestasi dalam tubuh masyarakat melalui kekurangan gizi dan penyakit kronis

PENUTUP

Surplus pangan nasional yang dihasilkan Kabupaten Merauke tidak secara otomatis berbanding lurus dengan perbaikan kondisi gizi masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat. Peningkatan produksi beras melalui proyek lumbung pangan nasional lebih menekankan capaian kuantitatif dibandingkan pemenuhan kebutuhan nutrisi yang beragam dan kontekstual. Alih fungsi lahan adat menjadi kawasan pertanian monokultur telah menghilangkan sumber pangan tradisional seperti sagu, protein hutan, dan biota air tawar yang selama ini menopang ketahanan pangan lokal. Kondisi tersebut menyebabkan pergeseran pola konsumsi masyarakat dari pangan lokal yang kaya nutrisi menuju pangan pasar yang homogen dan rendah mikronutrien. Ketimpangan ini diperparah oleh sistem distribusi pangan yang lebih mengutamakan kepentingan pasar

nasional daripada akses pangan masyarakat sekitar wilayah produksi. Dalam perspektif ekologi politik, krisis nutrisi di Merauke bukan disebabkan oleh kelangkaan pangan, melainkan oleh relasi kuasa yang timpang dalam pengelolaan sumber daya alam.

Negara dan korporasi memiliki peran dominan dalam mengendalikan lahan dan produksi pangan, sementara hak ulayat masyarakat adat cenderung terpinggirkan. Fragmentasi ruang hidup akibat proyek pangan skala besar turut melemahkan sistem sosial, budaya, dan pengetahuan lokal yang terkait dengan pangan. Dampak paling nyata dari kondisi ini terlihat pada tingginya prevalensi stunting dan anemia pada kelompok rentan, terutama anak-anak. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat diukur semata dari surplus produksi, tetapi harus mencakup aspek akses, kualitas gizi, dan keberlanjutan ekologi. Oleh karena itu, kebijakan pangan ke depan perlu mengintegrasikan perlindungan ruang hidup adat, keberagaman pangan lokal, serta pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., & Firman, A. (2020). *Ekologi Politik: Perebutan Kuasa atas Ruang Hidup*. Jakarta: Gramedia.
- Adiwilaga, R., Muthmainah, D. S., & Riaji, I. A. R. (2025). Strategi

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Meningkatkan Partisipasi Disabilitas Fisik Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1).
- Andaiyani, S., Marwa, T., & Nurhaliza, S. (2024). Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan: Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(1), 69–85. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i1.324>
- Benegiamo, M. (2022). Agrarian development and food security: Ecology, labour and crises. *Handbook of Critical Environmental Politics*, Robbins 2004, 157–169. <https://doi.org/10.4337/9781839100673.00018>
- Budiono, E. (2025, October 24). Merauke Cetak Surplus Beras Hingga 193 Ribu Ton. *Infopublik.Id*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/943960/merauke-cetak-surplus-beras-hingga-193-ribu-ton>
- FAQ. (2017). Nutrition-sensitive agriculture and food systems in practice. Options for intervention. In *Nutrition-sensitive agriculture and food systems in practice. Options for intervention*.
- Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan konflik sumber daya alam terbarukan di perbatasan dalam pendekatan ekologi politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 144–151.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Kemenkes RI. (2023). Factsheets: Stunting di Indonesia dan Determinannya. *Ski*, 1–2.
- Lahay, S. (2025, November 20). Masyarakat Adat Papua di Tengah Pusaran PSN Merauke. *Mongabay.Co.Id*. <https://mongabay.co.id/2025/11/20/masyarakat-adat-papua-di-tengah-pusaran-psn-merauke/#:~:text=Dampaknya terasa nyata,pangan dan pembangunan%2C> ucapnya.
- McMichael, P. (2013). *Food regimes and agrarian questions* (2nd ed.). Fernwood Publishing.
- Merauke, B. (2025). Perbandingan Produksi Beras vs Prevalensi Stunting. *BPS Merauke*, 38. https://web-api.bps.go.id/download.php?f=m08ZcjpQQNaJ8YYy6exQWd2TjRPS3dUL2F5aERtd3VEWk4yV2U0cnBTZ3IyUEtISUF6dE1OL2ZQVzk4MEhDQW1qMzJWR0NJaDBkbG9FSnZqNm1wcmZGK2c2b3JQclVHTDljMHBidGkxR0hPdHZRSE9nSXIXTnJ4alpBZzEzMVJPN21XNE0vQWVaWXRvMzRx bEFacVdOS0NIIdGtZWE1zMnJXMGdDUiBjbm0Q0FUDzI1RnNRRzRSMkJldkjhQkZaeTNaWmJYaW5hUXVRczhOd1ZoeHQvUVRvUlJKZHdtcTM4NWQ2V1JmYjhWZE1UN3hramVCZm9zdVF0MGUzYVBvalpuYUpCcW9VbGFQbU85cm8=&_gl=1*g3iwvo*_ga*MTAxOTE5NzgWmi4xNzY

- 4NTQyNjY4*_ga_XXTTVXWHD
B*czE3Njg2Nzg3MDQkbzlkZzA
kdDE3Njg2Nzg3MDQkajYwJG
wwJGgw
- Munawaroh, N., & Riaji, I. A. R. (2025). UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI TRANSFORMASI PELAYANAN BERBASIS DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA BANDUNG. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2).
- Peluso, N. L. (2016). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia , Malaysia , and Thailand. *Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812.
- Pusaka, Y. (2024, October 28). Militer dilibatkan dalam proyek Food Estate di Merauke, masyarakat adat “ketakutan” – ‘Kehadiran tentara begitu besar seperti zona perang. *Bbc.Com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ymye345do>
- Radiansyah, R. R. (2019). Konsumerisme Hingga Hiper-Realitas Politik Di Ruang Publik Baru Era Cyberspace (Antara Kemunduran Atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia yang Demokratis). *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 30–47.
- Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford University Press.
- Wisnaeni, F., & Najib, A. A. (2025). National Food Security and Local Sovereignty: Legal-Ecological Critique of Indonesia’s Food Estate Policy. *Current Research in Nutrition and Food Science Journal*, 13(3), 1320–1334. <https://doi.org/10.12944/crnfsj.13.3.22>
- Widiyaningrum, W. Y., & Riaji, I. A. R. (2023, December). Collaborative Governance on Mangrove Rehabilitation by Indralayang Village and PT. PLN West Java at Karang Modang. In *3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)* (pp. 1148–1160). Atlantis Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yuwono, F. P. (2024). Legal Implications of the Merauke Food Estate: A Critical Analysis of Customary Rights and Environmental Concerns. *Lex Publica*, 11(2), 294–316. <https://doi.org/10.58829/lp.11.2.2024.274>